

Analisis Kendala Pengimplementasian Pendapatan pada SIMDA Keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

AGNES M.D KEWAS¹, HERMAN KARAMOY², LINDA LAMBEY³

^{1,2,3} Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
Email: merrykewas@gmail.com¹, hkaramoy@yahoo.com², lindalambey@yahoo.com³

Abstrak. *SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan) Keuangan merupakan persyaratan dan kebutuhan bagi pemerintah provinsi untuk mengelola uang negara. Kehadiran SIMDA Keuangan diharapkan dapat berkontribusi terhadap proses pengelolaan keuangan negara, terutama pada tahap pelaporan keuangan harus dapat berjalan lebih baik. Studi ini menyelidiki masalah implementasi SIMDA Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Sulawesi Utara. Metodologinya adalah analisis studi kasus dan metode kualitatif. Studi ini menemukan beberapa masalah dalam penerapan aplikasi SIMDA yaitu: (a) Kurangnya integrasi sistem dan sinkronisasi antara SIMDA Keuangan, SIMDA Pendapatan dan Bank SulutGo. Hal ini dapat dilihat melalui tidak adanya sistem pembayaran online yang efisien dan realtime serta ketidakefisienan proses verifikasi data. (b) Kinerja dan integritas sumber daya manusia yang relevan masih kurang, dan (c) Kurangnya komitmen yang ditunjukkan oleh manajemen tingkat atas untuk mempertahankan dan meningkatkan proses bisnis SIMDA Keuangan.*

Kata kunci: *SIMDA Keuangan, integrasi sistem, sumber daya manusia, komitmen atasan.*

Abstract. *SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Keuangan is a compulsory requirement and a necessity for a provincial government to manage state's money. The presence of SIMDA of Finance is expected to contribute to the process of state's financial management, particularly at the stage of financial reporting should be able to operate better. This study investigates the implementation problems of the SIMDA Keuangan at the Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) in North Sulawesi. This is a qualitative case study. This study found several problems in the implementation of SIMDA application. Those problems are: (a) Lack of system integration and synchronization between SIMDA Keuangan, SIMDA Pendapatan and Bank SulutGo. This can be evidenced by the absence of an efficient, realtime online payment system and the inefficiency of data verification process, (b) Performance and integrity of relevant human resources are still lacking, and (c) The lack of commitment shown by upper level management to maintain and improve the business process of SIMDA Keuangan.*

Keywords: *SIMDA Keuangan, system integration, human resources, commitment of superiors.*

Pendahuluan

Tercapainya manajemen daerah yang optimal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi komputer berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Program aplikasi SIMDA merupakan aplikasi yang ditunjukkan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Pengembangan perangkat lunak aplikasi SIMDA memiliki empat tujuan. Pertama, menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, asset daerah, kedua, keuangan hingga pelayanan publik, menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan, ketiga mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi, dan keempat yakni memperkuat basisi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Program implementasi SIMDA yang telah diimplementasikan meliputi implementasi SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan.

Aplikasi SIMDA Keuangan dan Pendapatan telah diterapkan oleh berbagai Pemerintah Provinsi di Indonesia. Sampai dengan bulan September 2015, program aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 425 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada atau sebanyak 78,41%. Pemerintah Daerah Sulawesi Utara (Sulut) merupakan salah satu Pemda yang menggunakan Aplikasi SIMDA untuk membantu pengelolaan keuangan daerah. Sejak diterapkan, walau dapat dilihat adanya kemajuan, pastinya penerapan sistem baru disertai kendala, seperti kendala teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi, ataupun kendala kompetensi SDM.

Studi Ramadhan dan Moentoro (2013) mengungkapkan bahwa perlunya faktor komitmen pimpinan dalam menjalankan sistem yang baru. Menurut mereka walaupun pimpinan sudah puas dengan informasi yang disampaikan, namun pimpinan juga akan merasa belum puas dengan kelengkapan sistem jika sistem tersebut menghasilkan laporan keuangan yang belum mencakup laporan manajerial lainnya. Akan tetapi, menurut narasumber ada juga komitmen pimpinan yang dianggap masih rendah dalam hal pengembangan sistem baru. Hal ini dikarenakan pimpinan belum secara pro aktif dalam meminta informasi dan dalam proses pengembangan sistem untuk menghasilkan informasi laporan manajerial lainnya contohnya dalam hal penganggaran untuk pengadaan SIMDA *online* yang tidak tertata dalam APBD tahun berjalan. Penelitian Setiaji (2017) menyatakan bahwa permasalahan yang sering muncul dalam sistem informasi keuangan adalah pemakai sistem informasi merasa bingung untuk mengoperasikan sistem tersebut, karena mereka merasa kurang percaya diri dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan yang ada, dan mereka tidak dilibatkan dalam pengembangan sistem sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup contohnya beberapa SDM yang mengoperasikan sistem tersebut tidak memiliki latarbelakang pendidikan IT dan bahkan di beberapa Perangkat Daerah khususnya Samsat yang menggunakan THL yang hanya tingkat pendidikannya SMA/SMK. Kendala lain yang diungkapkan oleh Ramadhan dan Moentoro (2013) bahwa menurut pengguna sistem informasi, salah satu kendala pada penerapan sistem informasi yakni belum dapatnya sistem yang menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan diluar informasi keuangan, dan harus disempurnakan, serta diintegrasikan dengan sistem yang lain.

Dalam penerapannya, SIMDA harus memenuhi beberapa kriteria sehingga dikatakan efektif. Pangestika dan Sari (2016) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa penerapan suatu SIMDA harus menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, dapat dipahami, relevan, dapat diperbandingkan, serta tepat waktu. Namun dalam penerapannya masih terdapat sistem yang belum memenuhi kriteria diatas.

Tjahjanulin dan Amin F (2016) menjelaskan dalam fenomena penerapan SIMDA juga terdapat faktor yang dianggap menghambat kelancaran pelaksanaan sistem. Sistem belum terintegrasi dengan seluruh SKPD secara online, sehingga pemindahan data-data keuangan masih dilakukan dengan cara manual, kemudian kurang fleksibelnya aplikasi SIMDA Keuangan sehingga seluruh perbaikan sistem aplikasi hanya bisa menunggu respon dari pengembang program SIMDA Keuangan dan yang terakhir permasalahan sumber daya manusia selaku operator yang masih belum maksimal dalam pengoperasian SIMDA Keuangan.

Demikian juga dengan Pemprov Sulawesi Utara, dimana masih terdapat laporan dan keluhan dari para pegawai mengenai problem dalam menerapkan SIMDA Keuangan yang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sulawesi Utara. Masalah-masalah yang terjadi yaitu terjadi pada proses rekonsiliasi kas yang diakibatkan oleh sistem yang tidak terintegrasi dengan baik dan permasalahan server database yang ada di instansi ini.

SIMDA Keuangan yang tidak terintegrasi dengan rekening kas dapat menyebabkan beberapa masalah. Pertama, masalah proses *input* data pendapatan daerah yang terhambat prosesnya akibat harus menunggu rekonsiliasi kas. Rekonsiliasi kas ini harus dilaksanakan akibat ketidakjelasan keterangan pihak-pihak penyeter ke kas Bank Sulut yang kurang terintegrasi dengan baik sehingga informasi yang diberikan kurang akurat dan butuh proses tambahan seperti rekonsiliasi. Sistem yang kurang terintegrasi ini juga mengakibatkan kesalahan setor yang informasinya tidak bisa disimpan dengan baik oleh sistem. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi seperti kesalahan validasi tanggal pada penyeteroran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan juga kesalahan pada pemasukan nominal, yang pada akhirnya bisa lebih dan bisa kurang.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisa kendala pada pengimplementasian Pendapatan pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara. 2) Untuk memberikan solusi terkait kendala pengimplementasian Pendapatan pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Metode ini biasanya digunakan seseorang ketika akan meneliti terkait dengan masalah sosial dan budaya.

Creswell (2007) menjelaskan bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu dan organisasi.

Menurut Yin (2009), studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas atau jelas dan menggunakan berbagai sumber atau multisumber bukti. Justifikasi pemilihan metode studi kasus dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dianggap paling tepat untuk dapat menginvestigasi fenomena yang kompleks dalam *study context* penelitian ini. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi SIMDA dan permasalahan yang terjadi di Pemprov Sulut sebagai *study context*. Yin (2011) menekankan bahwa data merupakan fondasi dari sebuah studi penelitian, dan dalam penelitian kualitatif, data yang relevan dikumpulkan dari empat aktivitas penting, yakni: *interviewing, observing, collecting and examining materials, dan feeling*.

Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan/observasi (*observation*) dan dokumentasi (*material documentation*). Afrianty (2014) mendeskripsikan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas). Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun ke lapangan (Sugiyono dalam Kurniawan et. al, 2017). Sugiyono (2012) menerangkan bahwa peneliti kualitatif ialah *human instrument* yang memiliki fungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, yang disebut juga *Qualitative Content Analysis*. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Dalam penelitian ini, informasi tertulis yang dimaksud ialah hasil *interview*.

Hsieh dan Shannon (2005) menerangkan bahwa teknik analisis isi tidak menggunakan hanya satu pendekatan, melainkan tiga pendekatan yang terdiri dari pendekatan konvensional (*conventional content analysis*), terarah (*directed content analysis*) serta sumatif (*summative content analysis*). Ketiga pendekatan analisis ini bertujuan sama, yakni menganalisis data yang tersurat (wawancara) dan semuanya berpedoman pada asas memahami makna realitas peristiwa. Hal yang membedakan ketiga pendekatan ini ialah skema pengkodeannya (*coding*). dapat disimpulkan bahwa analisis isi kuantitatif / *quantitative content analysis* lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak, nyata atau tertulis.

Analisis dan Pembahasan

Sub bagian pertama pada hasil dan pembahasan mendeskripsikan tentang proses pencatatan pada SIMDA Keuangan di BPKAD Provinsi Sulut. Hasil ini menjabarkan langkah-langkah proses pencatatan keuangan dari sejak diperolehnya pendapatan daerah hingga masuk ke SIMDA Keuangan.

Pada bagian selanjutnya dijelaskan tentang kendala pada penerapan SIMDA Keuangan ini. Data wawancara, data dokumentasi dan data observasi langsung yang diperoleh, kemudian dilakukan organisasi data yaitu *coding* dan kategorisasi berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan pemahaman untuk menemukan tema yang ada. Untuk menjawab masalah pertama yaitu apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala bagi BPKAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menerapkan SIMDA Keuangan, ditemukan beberapa poin penting yang ada terbagi atas masalah *software* dan jaringan, *hardware*, sumber daya manusia, dan komitmen atasan.

Proses Pencatatan Pada SIMDA Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data melalui teknik wawancara yang di lakukan kepada 11 responden, maka hasil penelitian untuk menjawab atas pertanyaan pertama yaitu : “Bagaimana proses Pengimplementasian Pendapatan pada Simda Keuangan di Pemprov Sulawesi Utara, jika sudah baik mengapa?” ditemukan beberapa tahap yang digambarkan oleh beberapa informan, yang di rangkum dalam hasil organisasi data ditunjukkan dalam table 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1 Organisasi Data Untuk Masalah Pertama
(Proses Pencatatan Pada SIMDA Keuangan)**

| No. | Triangulasi dengan <i>Selective Coding</i> | | | | Tema Yang Ditemukan |
|-----|---|--|---|----------------|---------------------------------------|
| | Koding Wawancara / Isi Kategori | Open Coding / Kategori | Informan | Kode Komentar | |
| 1. | Pelaku usaha menyettor langsung dan mendapat bukti STS Penyetoran pajak kendaraan terdiri atas PKB dan Jasa Raharja (SWDKLLJ) serta Denda, | Masih banyak terjadi setoran secara gabungan sehingga tidak terinci dengan baik. | Bapak Rommy – Bend. Penerimaan BP2RD, Ibu Imelda Turangan – Samsat Minut | A1, A6, A7, A2 | Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas |
| | Penginputan di SIMDA menggunakan STS yang diprint Samsat, | Penginputan di SIMDA masih harus mencocokkan dengan bukti setoran | | | |
| | Penginputan ini kemudian dicocokkan dengan bukti setoran di Bank Sulutgo, | | | | |
| | Yang diinput di SIMDA sesuai dengan Bukti penerimaan, STS dan RPH | | | | |
| | Pelaku usaha menyettor langsung dan mendapat bukti STS | Bukti belum langsung diterima setelah pengusaha menyettor pajak. | Ibu Santje Loway – Bendahara Dinas Kelautan & Perikanan | | |
| | Tapi setelah disettor, buktinya belum langsung dibawa ke DKP | | | | |
| | Pelaku usaha cenderung membayar di bank dekat domisili mereka | | | | |
| 2. | Ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, baru ada lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah | Ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, baru ada lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah | Hans Poli – Staf Ahli Akuntansi | A3, A4, A8, A5 | Prosedur Akuntansi dan Pelaporan |
| | Sulit mengidentifikasi pendapatan yang masuk di RKUD untuk di input dalam sistem | Input data transaksi Uraian-uraian pada setoran belum jelas, tidak sesuai uraian pada SIMDA | Ibu Wanda – Kabid Perbendaharaan | | |
| | Uraian yang ada pada rekonsiliasi kurang jelas | | Ibu Olke Kawatu – Kasubbid Investasi Hutang Piutang | | |
| | Proses pengimputan pada SIMDA menjadi rumit untuk memilih rekening mana yang harus ditempatkan. | | | | |
| | Perlu dilakukannya rekonsiliasi setelah pencatatan | Rekonsiliasi | Ibu Emi Purukan – Kabid Akuntansi | | |

Aplikasi SIMDA sebagai pendukung pengelolaan keuangan memiliki beberapa tahap proses. Proses ini dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan mulai penginputan RKA pembuatan DPA penginputan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sampai dengan bukti penerimaan dan penyetoran ke Bank. Seperti yang ditekankan pada hasil penelitian Pangestika dan Sari (2016), bahwa mulai dari jurnal sampai laporan keuangan. Semua itu diolah dengan menggunakan media komputerisasi, itulah yang disebut SIMDA. Bagian lain sebagai pendukung pengelolaan keuangan hanya bertugas menginput data ke dalam sistem dan mengawasi proses pengolahannya sampai menghasilkan laporan yang diinginkan.

Proses pelaksanaan SIMDA Keuangan terkait perannya dalam Administrasi yaitu mencakup pengumpulan data keuangan, perencanaan anggaran, pertanggungjawaban serta pelaporan anggaran (Hertanto, Domai dan Amin, 2016).

Demikian juga untuk belanja mulai dari penginputan bukti belanja penginputan penerimaan pajak penyetoran pajak, pembuatan SPP, SPM sampai dengan SP2D baik itu untuk belanja dengan GU/UP/TU, kemudian dilakukan *posting*. *Posting* merupakan proses pemindahan informasi, minimal berupa tanggal transaksi dan jumlah rupiah dalam buku jurnal ke buku besar yang berhubungan dengan masing-masing ayat jurnal.

Setelah semua proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dilakukan secara benar, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Penyusunan LKPD dengan menggunakan SIMDA Keuangan. Pada BPKAD Provinsi Sulut, prosedur pencatatan yang dicakup oleh SIMDA Keuangan meliputi: prosedur Anggaran (RKA, DPA), prosedur pada Verifikasi, Perbendaharaan, dan Akuntansi, prosedur Bendahara Pengeluaran, dan prosedur Bendahara Penerimaan. Berikut adalah uraian prosedur pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan.

Kendala Pengimplemantasian Pendapatan pada SIMDA Keuangan di Pemprov Sulut

Untuk menjawab masalah pertama yaitu: “Apa sajakah masalah-masalah terkait proses Pengimplemantasian Pendapatan pada Simda Keuangan di Pemprov Sulawesi Utara?” ditemukan beberapa poin penting yang ada terbagi atas masalah *software* dan jaringan, *hardware*, sumber daya manusia, dan komitmen atasan. Hasil organisasi data ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2 Organisasi Data Untuk Masalah Pertama
(Kendala Pengimplemantasian Pendapatan pada SIMDA Keuangan di Pemprov Sulut)**

| No. | Triangulasi dengan <i>Selective Coding</i> | | | | Tema Yang Ditemukan |
|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | Koding Wawancara / Isi Kategori | Kategori | Informan | Kode Komentar | |
| 1. | Jika sistem sudah online semua, bendahara tidak perlu tarik STS yang diterima lewat Samsat, karena setoran sudah langsung terlihat di Bank Sulut. | Sistem pada Samsat belum terintegrasi dengan instansi lain, sehingga rinciannya juga belum jelas, disarankan untuk menerapkan kode bayar. | Bapak Rommy – Bend. Penerimaan BP2RD | A9, A10, A11, A12, A13 A14, A15, A16 | Aplikasi Antar Instansi Yang Belum Tersinkron |
| | Sistem pada Samsat belum terintegrasi dengan instansi lain. Seperti Bank Sulut dan Keuangan. | | | | |
| | Pada SIMDA Keuangan, Bend. penerimaan menginput secara manual. | Kategori dan uraian dari bank sulut tidak sinkron dengan SIMDA | Ibu Imelda Turangan – Samsat Minut | | |
| | Input manual ini berdasarkan data di sistem, berupa STS. | | | | |
| Bank sulut dengan BPKAD tidak sinkron pencatatannya | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|-------------------------|---|
| | Pihak BPKAD mengidentifikasi dan merekonsiliasi pendapatan dengan perangkat daerah | Terdapat masalah bahwa pendapatan yang masuk tidak | Ibu Sepriani Lalimbat – Staf Bidang Akuntansi BPKAD | | |
| | Terdapat masalah bahwa pendapatan yang masuk tidak jelas asalnya dari mana. | jelas asalnya dari mana, sehingga harus di-rekon. | | | |
| | Pendapatan itu bisa dari kabupaten-kota, jasa raharja atau dinas. | | | | |
| | Dinas pendapatan punya sistem baru dan tidak sinkron dengan SIMDA | Sistem baru yang ada pada Dispenda/BP2RD belum bersinkronisasi dengan baik dengan SIMDA | Ibu Wanda – Kabid Perbendaharaan | | |
| | Kurangnya integrasi yang baik dengan sistem di Bank Sulutgo | Aplikasi SIMDA tidak tersinkronisasi dengan baik dengan Bank Sulutgo | Ibu Emi Purukan – Kabid Akuntansi | | |
| 2. | Jika mereka membawa buktinya terlambat, Maka pencatatan akan terlambat/terganggu Pencatatan dengan uang yang masuk di RKUD akhirnya sinkron atau tidak <i>realtime</i> | Pencatatan masih bergantung lambat cepatnya bukti setor diterima | Ibu Santje Loway – Bendahara Dinas Kelautan & Perikanan | A17, A16, A18 | Sistem Pembayaran Yang <i>Real-Time</i> |
| | Proses pencatatan tidak realtime. yang tercatat di Bank belum semerta-merta sama di SIMDA | Aplikasi SIMDA tidak tersinkronisasi secara realtime dengan baik dengan Bank Sulutgo | Ibu Emi Purukan – Kabid Akuntansi | | |
| | Proses penginputan, ada yang terkadang menyetor sudah lewat waktu. | | | | |
| | Terkadang bendahara penerimaan belum memasukkan laporan pendapatan | Penginputan di SIMDA ada masalah yakni sering terlambat. | Ibu Veronica Hamei – Bend. Penerimaan Balai Pelabuhan Perikanan | | |
| | Makanya sering terjadi terlambat input di SIMDA. Kadang terlewat bulan | | | | |
| 3. | Untuk hardware, lampu perangkat sering mati. | Hardware sering mengalami kerusakan yang sangat mengganggu pekerjaan | Bapak Steven Kumenit – Administrator SIMDA | A19, A20, A21, A22, A23 | Sarana dan Prasarana |
| | Matinya lampu ini sangat memengaruhi pekerjaan. Bahkan data dampai hilang. | | | | |
| | Masalah pada hardware ini mengakibatkan alat yang lain rusak. | | | | |
| | Laptop hanya 1 untuk mencatat STS yang masuk Sedangkan laptop tersebut dimanfaatkan juga untuk pekerjaan lain | Kurangnya sarana berupa komputer untuk pencatatan. | Ibu Santje Loway – Bendahara Dinas Kelautan & Perikanan | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|-----------|----------------------------|---|
| 4. | SDM yang menginput kurang paham proses penginputan dengan benar | Kurang SDM yang punya kapabilitas | Ibu Emi Purukan – Kabid Akuntansi | A24, A26, A28 | A25, A27, | Kualitas dan Kemampuan SDM | |
| | SDM penginput hanya staf honor atau pegawai pindahan | | | | | | |
| | Hasil penginputan sering salah dan sulit diproses bagian akuntansi | | | | | | |
| Masalah juga ada pada kesalahan input kode rekening, pada pajak dan denda. | Terdapat masalah-masalah SDM. | Bapak Rommy – Bend. Penerimaan BP2RD | Hans Poli – Staf Ahli Akuntansi | A28, A29, A30, A31, A32, A33 | A29, A31, | Pada Komitmen Pimpinan | |
| | | | | | | | Masalah SDM juga ada pada kurangnya pegawai operator. |
| | | | | | | | |
| Ada kendala bahwa SKPD asal input akun pendapatan. | Masalah terdapat pada kualitas dan kemampuan SDM. | Bapak Steven Kumenit – Administrator SIMDA | Hans Poli – Staf Ahli Akuntansi | A28, A29, A30, A31, A32, A33 | A29, A31, | Pada Komitmen Pimpinan | |
| Tingkat SDM masing-masing pengelola di SKPD tidak merata | | | | | | | |
| Petugas lama sering diganti-ganti dan dimutasi | | | | | | | |
| Petugas baru banyak tidak tau tentang pendapatan dan klasifikasinya | Masalah terdapat pada kualitas dan kemampuan SDM. | Bapak Steven Kumenit – Administrator SIMDA | Hans Poli – Staf Ahli Akuntansi | A28, A29, A30, A31, A32, A33 | A29, A31, | Pada Komitmen Pimpinan | |
| Petugas baru banyak tidak tau cara menginput dan sering terjadi kesalahan | | | | | | | |
| 5. | Pelatihan dan program peningkatan kualitas SDM masih kurang | Kurang komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas SDM | Bapak Steven Kumenit – Administrator SIMDA | A28, A29, A30, A31, A32, A33 | A29, A31, | Pada Komitmen Pimpinan | |
| | Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana masih kecil | | | | | | |
| | SDM masih kurang yang berlatarbelakang IT | | | | | | |
| Ada masalah koordinasi dengan Polda, dan Jasa Raharja karena tidak balas menyurat mengenai sosialisasi nontunai | Perlu ditingkatkan kordinasi dengan instansi lain seperti Polda. | Bapak Rommy – Bend. Penerimaan BP2RD | Ibu Imelda Turangan – Samsat Minut | A28, A29, A30, A31, A32, A33 | A29, A31, | Pada Komitmen Pimpinan | |
| Tidak adanya penempatan pos anggaran khusus SIMDA | Pimpinan kurang memperhatikan peningkatan kualitas SIMDA | Ibu Santje Loway – Bendahara Dinas Kelautan & Perikanan | | | | | |

1. Kendala Pada Software dan Jaringan

Masalah terkait software merupakan masalah yang paling krusial dan paling dibahas oleh para informan, karena hampir semua informan mengeluhkan tentang hal ini. Dari proses koding dan kategorisasi data, setidaknya terdapat dua poin masalah terkait software SIMDA dan software yang menjadi pendukungnya, yakni:

- Aplikasi SIMDA dan aplikasi pada instansi lain seperti pada BP2RD/Dispenda serta Bank Sulut, belum tersinkron.

Penerapan sistem antar instansi masih belum terintegrasi dengan baik. Yakni antara Bank Sulut, Dispenda (BP2RD) dan BPKAD selaku operator SIMDA Keuangan. Dalam hal ini, yang belum tersinkron ialah *query*. *Query* adalah semacam kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database dimana mengambil dari tabel-tabel yang ada di database, namun tabel tersebut tidak semua ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan serta data apa yang ingin kita tampilkan. Query ini bahasa umumnya

dalam praktiknya dalam SIMDA dikenal sebagai uraian detail dari suatu bukti transaksi uang masuk. Rincian belum jelas mengenai apa saja yang menjadi tipe pembayaran. Seperti contohnya, pendapatan yang masuk tidak bisa dibedakan dari tipe mobil (misalnya jip, sedan, ataupun minibus) bahkan motor, dan asal pendapatan (Pajak, denda, jasa raharja). Penemuan ini serupa dengan hasil studi Hertanto, Domai dan Amin (2017) yang meneliti penerapan SIMDA Keuangan di daerah Blitar. Hasil studi mereka mengungkapkan hal yang sama, bahwa yaitu belum terintegrasinya SIMDA Keuangan dengan seluruh SKPD secara online, sehingga pemindahan data-data keuangan masih dilakukan dengan cara manual. Hal ini diakui menghambat efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

- Belum terdapatnya sistem pembayaran online yang *real-time*.

Di antara Bank Sulutgo dan SIMDA Keuangan dari BPKAD belum terdapat sistem pembayaran yang *realtime*. Dalam hal ini, sistem pembayaran yang *realtime* berarti di saat terdapat uang masuk di RKUD yang disetor oleh wajib pajak, uang masuk tersebut bisa terbaca dengan akurat pada SIMDA. Masalah belum terdapatnya sistem pembayaran online yang real time ini berpengaruh kepada kualitas informasi dan data yang akan diproses oleh SIMDA Keuangan. Jogiyanto dalam Ramadhan (2013) mengungkapkan bahwa kualitas sistem merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur sistem teknologi informasi. Kualitas sistem, terutama informasi dalam hal ini yakni ketidakakuratan data yang masuk dan kurang rincian sehingga mengganggu proses pencatatan keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil studi Ramadhan (2013) bahwa keakuratan informasi juga menjadi masalah dalam penerapan suatu sistem. Sistem ini bertolak belakang dengan metode yang “setengah manual” yang masih digunakan operator SIMDA dalam pencatatan.

2. Sarana dan Prasarana

Hardware yang digunakan pada pengoperasian SIMDA pada dasarnya terdiri atas set komputer/laptop, perangkat jaringan, serta *server database*. Dan setiap komponen ini ditemui banyak masalah yang bisa berakibat fatal pada data yang tersimpan di *database*. Kekurangan jumlah atau kurangnya spesifikasi yang ada pada *hardware* komputer dalam instansi dapat menyebabkan masalah, hal ini serupa dikemukakan oleh Madjid (2011). Pada SIMDA di instansi BPKAD juga belum terdapat sistem *backup* otomatis sebagai pendukung *hardware server*. Backup otomatis sebenarnya merupakan sistem standar yang menjadi suport untuk *server database*, yang jikalau data mengalami masalah (hilang atau *corrupt*), bisa dikembalikan lagi seperti semula. Ketiadaan sistem pendukung server ini juga menjadi masalah besar, karena ketika data hilang atau *corrupt* sekarang, maka akan sangat sulit untuk dikembalikan lagi seperti semula.

Kendala yang lain yaitu sulitnya memberikan keluhan dan umpan balik mengenai masalah *hardware* pada server SIMDA. Ketika terjadi kerusakan pada *hardware*, petugas administrator SIMDA bisa saja mengeluhkan atau mengadakan permintaan untuk perbaikan. Namun pada kenyataannya hal ini tidak bisa terjadi dalam segera waktu karena butuh proses dari BPKP pusat selaku pengembang SIMDA dan BPKP harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kerusakan pada perangkat, dengan kata lain, mereka harus meneliti kerusakannya dulu sebelum mempersiapkan diri. Hal ini juga sesuai dengan *notion* dari Hertanto, Domai dan Amin (2016) yang menyatakan bahwa adanya kekurangan fleksibelan aplikasi SIMDA Keuangan, dimana seluruh perbaikan sistem aplikasi baru dapat dilaksanakan jika ada respon dari BPKP selaku pengembang program SIMDA Keuangan untuk melaksanakan perbaikan tersebut.

3. Kualitas dan Kemampuan SDM

Berkaitan dengan SDM, beberapa Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulut terkendala pada kualifikasi SDM. Pertama, kualifikasi ini berkaitan dengan banyaknya operator yang masih merupakan pegawai honor dan pegawai pindahan, sebagai contoh tenaga operator pendapatan yang ada di 15 UPTB BP2RB / Samsat semuanya menggunakan tenaga THL. Kedua, masalah kualifikasi ini berkaitan dengan kurangnya SDM yang berlatarbelakang IT salah satu kendalanya yaitu penerimaan dan pengangkatan PNS/ASN terakhir tahun 2011 untuk Pemerintah Daerah Khususnya Pemprov Sulut sehingga SDM dimasing-masing Perangkat Daerah yang bidang ilmu tertentu terbatas. Hertanto, Domai dan Amin (2016) juga menekankan bahwa permasalahan sumber daya manusia selaku operator masih belum maksimal dalam pengoperasian SIMDA Keuangan. Ramayah dan Zakaria dalam Suyanto, Taufiq dan Indriyati (2015) menyimpulkan bahwa ada tiga

kategori penghambat adopsi teknologi informasi dan salah satunya ialah masalah pada *human factor* yaitu kecakapan SDM.

Kendala pada kualifikasi SDM ini berdampak pada terhambatnya proses pencatatan yang akurat menggunakan SIMDA. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sering terjadi kesalahan dalam penginputan kata, kategori maupun angka yang dilakukan oleh operator SIMDA yang ada di Perangkat Daerah, sebagai contoh tenaga operator SIMDA yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pekerjaan rangkap, dimana semua pekerjaan yang menyangkut SIMDA dilakukan atau dikerjakan oleh satu orang, mulai dari penginputan bukti-bukti belanja pengeluaran sampai pembuatan SPP dan SPM serta penginputan bukti-bukti penerimaan sampai dengan bukti setoran pendapatan (STS). Sehingga konsentrasi untuk fokus dalam melaksanakan pekerjaan menjadi terganggu. Walaupun kesalahan ini bersifat kecil dan bisa diperbaiki, namun tetap saja menghambat proses operasi SIMDA.

Disamping masalah kualifikasi SDM itu sendiri, nampak juga bahwa kurang diadakannya program pengembangan. Beberapa informan mengeluhkan akan kurangnya program-program pelatihan dan pengembangan karyawan. Sosialisasi hanya dilakukan pada waktu SIMDA pertama kali diimplementasikan di BPKAD, namun seiring berjalannya waktu, nampak bahwa sangat kurang diandalkannya *update* pengetahuan tentang isu-isu SIMDA keuangan.

4. Komitmen Pimpinan

Dalam pengimplementasian SIMDA keuangan bahwa komitmen yang kuat dari atasan untuk meningkatkan performa SIMDA baik dari segi kualitas sistem dan SDM belum nampak. Ramadhan (2013) menekankan dalam penemuannya, bahwa komitmen pimpinan juga menjadi masalah dalam penerapan suatu sistem. Hal ini karena pimpinan belum secara pro aktif dalam meminta informasi dan dalam proses pengembangan sistem untuk menghasilkan informasi laporan manajerial lainnya. Hal ini terlihat dari setelah beberapa tahun berlakunya SIMDA Keuangan di BPKAD Provinsi Sulut, anggaran untuk peningkatan kualitas SDM serta pos-pos khusus untuk anggaran pengembangan SIMDA masih belum ada.

Dari segi peningkatan kualitas SDM masih terlihat kurang. Selama beberapa tahun berjalan, pengelolaan SIMDA masih melibatkan petugas-petugas yang merupakan pegawai honor dan pegawai pindahan yang belum terlalu memahami tentang SIMDA keuangan itu sendiri. Pegawai-pegawai yang merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) dan pindahan tersebut belum pernah mendapatkan program-program pengembangan skill berkala untuk mengoperasikan SIMDA Keuangan yang ada. Kemudian, sistem perekrutan yang masih kurang efektif karena masih kurangnya pegawai rekrutan yang berlatarbelakang TI (Teknologi Informasi). Sudah seharusnya pimpinan memperhatikan sistem perekrutan sesuai kebutuhan departemen khususnya yang berhubungan dengan sistem informasi.

Kedua, dari segi anggaran, anggaran dari segi penempatan khusus untuk pengembangan pegawai dan pengembangan sarana prasarana masih kurang. Contohnya dalam hal penyusunan RKA ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak menganggarkan pengadaan SIMDA *online*, karena komitmen atasan yang memprioritaskan kegiatan yang lain yang menjadi program kegiatan rutin teknis dari perangkat daerah tersebut berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan. Hal-hal ini tentunya menjadi bukti bahwa komitmen atasan untuk pengembangan kemampuan masih kurang.

Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pengimplementasian Pendapatan Pada SIMDA Keuangan Pemprov Sulut

Adapun upaya yang diungkapkan oleh informan untuk mengatasi masalah yang dijelaskan diatas dalam pertanyaan yaitu: "Apa saran untuk mengatasi masalah-masalah tersebut?" ditemukan beberapa poin penting yang ada terbagi atas masalah *software* dan jaringan, *hardware*, sumber daya manusia, dan komitmen atasan. Hasil organisasi data ditunjukkan dalam tabel 4.3 berikut ini:

**Tabel 4.3 Organisasi Data Untuk Upaya Mengatasi Kendala
(Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pengimplementasian Pendapatan Pada SIMDA
Keuangan Pemprov Sulut)**

| No. | Triangulasi dengan <i>Selective Coding</i> | | | | Tema Yang Ditemukan |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|---|
| | Koding Wawancara / Isi Kategori | Open Coding / Kategori | Informan | Kode Komentar | |
| 1. | Aplikasi di Bank Sulut dan SIMDA Keuangan BPKAD harus tersinkron dan terintegrasi dengan baik. | Solusi terkait masalah sinkronisasi yang belum terintegrasi. | Ibu Emi Purukan – Kabid Akuntansi | A34, A35, A36, A37, A38, A39 | Sinkronisasi Aplikasi SIMDA Keuangan dan Dinas Pendapatan |
| | Aplikasi SIMDA Pendapatan, Keuangan dan Bank Sulut terkoneksi dengan baik, sehingga laporan keuangannya aktual dan akuntabel. | | | | |
| | Memaksimalkan kordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk ketepatan pencatatan. | Memaksimalkan koordinasi untuk pengembangan fasilitas aplikasi SIMDA. | Ibu Olke Kawatu – Kasubbid Investasi Hutang Piutang | | |
| | Perlu adanya koordinasi dan fasilitasi dengan bank Sulut untuk kepentingan rekonsiliasi. | | | | |
| | BP2RD harus bisa mensosialisasikan pembayaran secara nontunai | Meningkatkan sosialisasi pembayaran secara nontunai | Ibu Imelda Turangan – Samsat Minut | | |
| | Untuk Bank Persepsi inputan harus jelas nama, alamat, dan jenis pendapatan. | Untuk Bank Persepsi inputan harus jelas nama, alamat, dan jenis pendapatan. | Hans Poli – Staf Ahli Akuntansi | | |
| | Pihak Dinas Pendapatan memiliki aplikasi sendiri yang tidak terintegrasi dengan SIMDA Keuangan | | | | |
| 2. | Adanya penempatan pos anggaran khusus SIMDA | Komitmen atasan mengutamakan SIMDA dalam penganggaran. | Ibu Santje Loway – Bendahara Dinas Kelautan & Perikanan | A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47 | Peningkatan Komitmen Pimpinan Untuk Pengembangan Sistem |
| | Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana | Pimpinan berkomitmen untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik | Bapak Steven Kumenit – Administrator SIMDA | | |
| | Memaksimalkan kordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk ketepatan pencatatan. Perlu adanya koordinasi dan fasilitasi dengan bank Sulut untuk kepentingan rekonsiliasi. | Komitmen atasan membina kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan Sistem | Ibu Olke Kawatu – Kasubbid Investasi Hutang Piutang | | |
| 3. | Saran, Untuk kedepannya harus ada anggaran untuk peningkatan SDM. Instansi juga harus membuka lowongan untuk pegawai berlatarbelakang IT. | Solusi untuk peningkatan pengembangan SDM | Bapak Steven Kumenit – Administrator SIMDA | A45, A48, A49 | Peningkatan Kualitas SDM |

| | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|-------------------------|---|
| | Perlu ditingkatkan pelatihan dan sosialisasi pada SDM. | Perlu ditingkatkan pelatihan dan sosialisasi pada SDM. | Bapak Rommy – Bend. Penerimaan BP2RD | | |
| | Perlu adanya kordinasi dan pelatihan petugas, operator dan bend. penerimaan. | Perlu adanya kordinasi | Hans Poli – Staf Ahli Akuntansi | | |
| 4. | Bank Sulut sedang mengupayakan sistem penerapan kode rekening dalam bentuk <i>Virtual Account</i> | Pengembangan sistem kode rekening dalam bentuk <i>Virtual Account</i> | Ibu Wanda – Kabid Perbendaharaan | A50, A51, A10, A52, A39 | Penerapan Kode Rekening atau <i>Virtual Account</i> pada RKUD |
| | Jika sistem sudah terintegrasi dengan baik dengan Bank Sulut, Bendahara tidak perlu lagi tarik data dri SIMDA | Aplikasi yang virtual account dapat mengintegrasikan informasi penerimaan pendapatan yang langsung terkoneksi dengan SIMDA Keuangan. | Bapak Rommy – Bend. Penerimaan BP2RD | | |
| | Sistem SIMDA Pendapatan dan Keuangan bisa menyesuaikan dengan membuat otomatisasi penginputan pendapatan berdasarkan kode bayar dari Bank Sulut. | | Hans Poli – Staf Ahli Akuntansi | | |

1. Sinkronisasi Aplikasi SIMDA Keuangan dan Dinas Pendapatan

SIMDA Keuangan dan Pendapatan terlihat belum tersinkronisasi. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh beberapa informan mengenai kedua belah sistem yang berada di dua instansi yang berbeda, memiliki perkembangan yang berbeda, sehingga mengalami ketimpangan. Solusi berupa integrasi yang baik yang diungkapkan dalam sinkronisasi ditekankan juga dalam penelitian Hertanto, Domai dan Amin (2016) yang menganjurkan integrasi online sebagai solusi, seperti penerapan Pemda Provinsi Banten dalam hal peningkatan PAD melalui Perjanjian Kerjasama dengan Bank Banten dalam hal penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pendapatan Retribusi lainnya yang dilakukan secara non tunai dengan *Integrated Payment System*, yang berguna untuk meningkatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB Tahunan, SWDKLLJ Tahunan dan Pengesahan STNK Tahunan melalui *Payment Point Online Bank* (PPOB) yaitu pengembangan layanan yang sebelumnya tradisional (manual) menjadi digital.

Di lain sisi, koordinasi yang baik perlu dilakukan antar pihak. Koordinasi, dalam hal ini berupa kesepahaman dan kesamaan prosedur kerja yang terstandar antar pihak. Bukan berkaitan dengan sistem. Pihak BPKAD selaku operator SIMDA Keuangan harus memaksimalkan koordinasi-koordinasi dengan perusahaan yang ada agar melakukan pembayaran secara tepat waktu dan tepat prosedur, agar proses pencatatan tidak bermasalah. Koordinasi antar pihak yang baik diperlukan sehingga proses *feedback* dan respon perbaikan akan selalu terjangkau dengan baik dan cepat (Hertanto, Domai dan Amin, 2016).

2. Peningkatan Komitmen Atasan untuk Pengembangan Sistem

Komitmen pimpinan juga menjadi masalah dalam pengimplementasian sistem informasi. Ramadhan (2013) menekankan bahwa hal ini terjadi karena pimpinan belum secara pro aktif dalam meminta informasi dan dalam mendukung proses pengembangan sistem untuk menghasilkan informasi laporan yang berkualitas.

Komitmen atasan untuk pengembangan sistem yang ada berkaitan dengan visi atasan dalam menciptakan proses pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik, dalam hal ini yaitu sistemnya efektif dan efisien, serta menghasilkan output yakni pelaporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan, tentunya harus ada anggaran yang memadai serta SDM yang bisa mengoperasikan dengan baik dan diadakannya pelatihan dan pengembangan operator sistem tersebut. Penganggaran dan evaluasi serta program-program pengembangan sistem tentunya disahkan dan dicetuskan oleh pimpinan, dalam instansi birokrat.

Salah satu solusi yaitu menyuarkan keluhan-keluhan dan saran pengembangan dalam rapat atau diskusi langsung dengan atasan. Perubahan yang ditekankan yaitu evaluasi sistem yang ada dan pengadaan pembaharuan sistem demi terwujudnya proses pencatatan yang lancar. SIMDA Keuangan telah beroperasi selama beberapa tahun di lingkup Pemprov Sulut, dan poin ini menunjukkan sudah saatnya evaluasi anggaran dan perhatian lebih dari atasan untuk mengembangkan sistem yang ada.

Pengelolaan keuangan harus mendapat komitmen yang tinggi dari pimpinan. Hal ini untuk mengatasi kurangnya realisasi evaluasi dan pembaharuan sistem baik dari segi sistem itu sendiri dan peningkatan komposisi dan kualitas SDM. Komitmen pimpinan dalam memiliki visi dan mengambil keputusan sangat krusial dalam mewujudkan program-program peningkatan dan evaluasi ini.

3. Peningkatan Kualitas SDM

Madjid (2011) mengemukakan bahwa di instansi pemerintah, contohnya BKKBN, masih terdapat masalah tentang peningkatan kualitas SDM yakni kurangnya SDM yang berkemampuan teknis serta penyelenggaraan pelatihan. Kualitas SDM menjadi masalah karena kurangnya SDM yang mumpuni di BPKAD dalam hal pengoperasian SIMDA Keuangan. Hal ini terlihat dari kurangnya pegawai yang berlatarbelakang teknologi informasi serta kontinuitas pengembangan kualitas.

Solusi peningkatan kualitas SDM terbagi atas dua bagian. Yang pertama, yaitu terdapatnya anggaran demi meningkatnya kualitas SDM. Terdapatnya anggaran yang cukup membuat instansi bisa melakukan pelatihan-pelatihan berkala terkait dengan SIMDA serta kontinuitas pengembangan sistem dilihat dari operatormya itu sendiri. Dengan adanya anggaran, bisa tercipta dokumentasi prosedur yang memungkinkan jika terdapat rotasi pegawai, pegawai baru bisa dengan mudah menyesuaikan pekerjaan menggunakan SIMDA, karena sudah ada dokumentasi prosedur yang baik.

Pelatihan dan pengembangan secara rutin juga diperlukan. Hal ini harus difokuskan bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan sistem, yakni operator, petugas dan Bendahara Penerimaan. Pelatihan dan pengembangan secara rutin dimaksimalkan agar tidak terjadi gap pengetahuan antara pegawai baru dan pegawai lama yang meninggalkan posisi-posisi itu. Pegawai baru bisa dengan cepat beradaptasi sehingga kualitas pekerjaan bisa tetap terjaga, dan human error terkait kesalahan penginputan dan akurasi laporan keuangan terjaga. Upaya ini sesuai dengan langkah saran yang diajukan penelitian Madjid (2011). Kebijakan perekrutan di instansi yang menggunakan SIMDA baik keuangan dan pendapatan harus membuka peluang lebar bagi calon ASN dan honorer yang berlatar belakang IT. Untuk sekarang, pegawai-pegawai seperti itu masih dirasa kurang cukup sehingga kedepannya, kebijakan perekrutan harus bisa lebih memprioritaskan tenaga kerja berlatar belakang IT.

4. Penerapan Kode Rekening atau *Virtual Account* pada RKUD

Rusdiana dan Irfan (2014) menerangkan bahwa sistem adalah himpunan suatu "benda" nyata atau abstrak (*a set of things*) yang terdiri atas bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketertgantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (unity) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya agar komponen-komponen yang ada, seperti sistem antar instansi, bisa saling berkaitan.

Dua penelitian sebelumnya yakni Hertanto, Domai dan Amin (2016) serta Madjid (2011) sepakat bahwa sinkronisasi dan koordinasi antar bagian dalam suatu sistem menjadi masalah penting. Poin solusi ini memiliki keterkaitan dengan hal-hal tersebut.

Dalam hal ini, sinkronisasi dan koordinasi merujuk kepada antar sistem dari pihak bank, Dinas Pendapatan, dan Pengelola Keuangan. Untuk poin ini, solusi berfokus pada kemutakhiran sistem Bank Sulut yakni untuk memilah kode pembayaran agar pembayaran memiliki notifikasi yang sesuai dengan kategori pembayaran (Pajak, Denda atau Jasa Raharja). Pajak, dalam hal ini PKB bisa diuraikan sesuai kategori per kendaraan. Asal transaksi, dari Dinas apa saja bisa dibedakan dengan adanya Kode Pembayaran ini.

Terdapat satu jenis solusi lagi yang berhubungan dengan instansi bank, yaitu penerapan *Virtual Account*. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pembayar (Wajib pajak, Instansi-instansi) yang dibuka oleh Bank (Bank Sulut) atas permintaan instansi pendapatan dan keuangan untuk selanjutnya diberikan oleh kepada pembayar pajak atau denda.

Virtual Account ini sangat mengefisienkan dan mengefektifkan proses pembayaran hingga pencatatan keuangan. Setiap transaksi pembayaran yang masuk sudah dipisah-pisahkan secara detil dari

perangkat daerah mana, jenis pembayaran apa dan masuk kategori apa. Virtual account merupakan sistem yang canggih dan memudahkan untuk diproses oleh SIMDA Keuangan karena sumber pendapatannya dan kategorinya jelas terbaca oleh sistem, serta meminimalisasi *human error*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan SIMDA Keuangan di Pemprov Sulut dapat dibagi atas empat poin pokok, yaitu *software* dan jaringan, *hardware*, sumber daya manusia (SDM), dan komitmen atasan.
2. Untuk kendala pada *software* dan jaringan, kendala utama ialah aplikasi SIMDA dan aplikasi pada instansi-instansi lain seperti pada BP2RD/Dispenda serta Bank Sulut, belum tersinkron dengan baik, dan belum terdapatnya sistem pembayaran online yang *realtime*.
3. Untuk kendala pada *hardware* (perangkat lunak) yang menjadi bagian dari SIMDA Keuangan, yakni tidak adanya perangkat yang bisa melindungi *server database* dari resiko data hilang (*data loss*), pengaduan kerusakan yang masih berbelit serta kurang cukupnya set perangkat komputer laptop untuk melakukan proses pencatatan dengan lancar.
4. Kendala pada SDM, yakni kurangnya SDM yang kapabel dalam memahami proses kerja SIMDA akibat masih dioperasikan oleh pegawai pindahan atau honorer, serta kurangnya pegawai SIMDA Keuangan yang berlatarbelakang teknologi informasi. Terkait dengan kendala ini, pelatihan dan program pengembangan skill yang berhubungan dengan SIMDA sangat jarang diadakan.
5. Kendala pada komitmen atasan untuk memperhatikan perkembangan SIMDA Keuangan, terlihat dari kurangnya anggaran untuk peningkatan performa sistem, anggaran untuk peningkatan kapabilitas karyawan, serta anggaran untuk mengembangkan sarana-prasarana terkait SIMDA.

Saran

Berdasarkan kendala-kendala yang telah dijabarkan pada bagian pembahasan dan ditekankan kembali di bagian kesimpulan, maka saran dan rekomendasi yang bisa diberikan peneliti dalam menjawab masalah, ialah sebagai berikut:

1. Dalam menjawab problem seperti yang telah diungkapkan sehubungan dengan masalah pada *software* dan jaringan, solusi yang harus dilakukan membutuhkan komitmen dari pihak luar dan BPKAD. Pihak luar ini salah satunya Bank Sulutgo, dan satunya lagi yaitu Pemerintah Provinsi Sulut bekerja sama dengan BPKP pusat selaku tim pengembang aplikasi. Pihak-pihak tersebut bisa membangun aplikasi dibawah platform yang sama, misalnya pengembangan aplikasi dari SIMDA Keuangan di BPKAD dan Dispenda harus bisa saling mengikuti, apakah SIMDA Keuangan yang dimiliki BPKAD mengikuti aplikasi yang ada pada Dispenda atau sebaliknya.
2. Dalam menjawab kendala pada *hardware* sistem, pihak BPKAD harus mengadakan peralatan berupa UPS yang dipasang untuk menunjang unit komputer serta mesin server yang ada, pihak BPKAD harus melakukan pengadaan perangkat penunjang berupa sistem *backup data* untuk meminimalisir resiko *data loss* yang biasa terjadi karena penurunan performa *hardisk* ataupun *disk* pada *server*.
3. Untuk solusi pada SDM, solusi langsungnya ialah melakukan program-program pelatihan secara berkala bagi para pegawai-pegawai honorer dan pegawai pindahan. Pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus mempunyai materi pelatihan yang *terupdate* untuk menyamaratakan standar kualifikasi pegawai dalam mengoperasikan sistem ini.
4. Untuk solusi pada kendala sinkronisasi sistem dan integrasi sistem antara RKUD (Bank), Dinas Pendapatan dan BPKAD, salah satunya dapat dibantu dengan penerapan kode pembayaran atau *virtual account* oleh bank.
5. Terkait dengan komitmen, para atasan dan pimpinan instansi harus lebih peka dan menyadari bahwa proses pencatatan menggunakan SIMDA mengalami kendala yang menghambat pekerjaan. Diperlukan perhatian yang lebih dalam mengembangkan sistem, memelihara sistem, penyediaan sarana prasarana, serta mendukung dan mengembangkan kemampuan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, F. 2014. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi Unikom Indonesia*. pp 1-17.
- Ahmad, J. 2018. *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*.
- Alamsyah, J. 2008. Pengembangan Prototipe Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) Berbasis Open Source di Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2007. Abstrak. Universitas Gadjah Mada.
- Al-Kasswna, R. O. 2012. Study and Evaluation of Government Electronic Accounting Information Systems - a Field Study in the Hashemite Kingdom of Jordan. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol 3(4). pp 88-102.
- Alshehri, M dan Drew, S. 2010. Implementation of e-Government: Advantages and Challenges. *Proceedings of the IASK International Conference E-Activity and Leading Technologies & InterTIC 2010*. pp 79-86.
- Alvarez, A. J. S. 2004. Challenges to Information Systems Implementation and Organisational Change Management: Insights from the Health Sector in Ecuador. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*. Vol 16 (1). pp 1-16.
- Akib, H. dan Tarigan, A. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*. pp 1-19.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2008. Kode Etik dan Standar Audit. Diklat Pembentukan Auditor Ahli Kode MA: 2.210. Edisi Kelima, PPPP-BPKP: Bogor
- Budiman, F dan Arza, F. I. 2013. Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Jurnal WRA*.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 2nd Edition. California: Sage Publications, Inc.
- Fujianti, L. 2013. Kekuatan Monitoring Internal dan Eksternal Biaya Keagenan Serta Dampaknya Terhadap Kebijakan Deviden. *Jurnal Liquidity*. Vol 2(2). pp 117-126.
- Hertanto, Y., Tjahjanulin, D., dan Amin, F. (2016). Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Blitar). *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*. Vol 1(2). pp 15-24.
- Hsieh, H. F dan Shannon, S. E. 2005. Three Approaches to Quantitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, Vol 15(9). pp 1277-1288.
- Kurniawan, I. M. A, Ratnadi, N. M. D, dan Dwirandra, A. A. N. B. 2017. Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten X. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol 6(10). pp 3579-3606.
- Madjid, P. I. 2011. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepagawaian (SIMPEG) Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tesis. Universitas Indonesia.
- Machmud, R. 2013. Hubungan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan dengan Kinerja Pegawai pada Rutan Makassar. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*.
- Novita, D. 2014. Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. *Jurnal Eksplora Informatika* Vol. 4(1).
- Nugraha, H. A dan Astuti, Y. W. 2013. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Akuntansi Aktual* Vol 2(1). pp 25-33.
- Ole, H. R. 2014. Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara).
- Pangestika A. L. dan Sari, Y. P. 2016. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal. *Jurnal SENIT* 2016.
- Panggabean, H. E. H. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir. Medan: USU Repository.

- Patu, L. 2016. Implementasi Kebijakan Manajemen Keuangan pada Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis*, Volume 4(2). pp 88-100.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Pemerintah. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 2010. Jakarta.
- Ramadhan, A. F dan Moentoro, R. K. 2013. Analisis Kendala Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pada Perguruan Tinggi Negeri. Publikasi Materi Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 2 - 4 Desember 2013. SESINDO.
- Raman, M., Kaliannan, M. dan Ming Yu, C. 2007. E-business and E-government: Issues and Challenges in Malaysia. *Information Technology Journal*, Vol 6. pp 428-434.
- Rizki, L. N. 2012. Penatausahaan Asset pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di kabupaten Malang. *Journal of Public Administration Research (JOPAR)*, Vol 1(1). pp 91-99.
- Rusdiana, H. A dan Irfan, M. 2014. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Penerbit Pustaka Setia
- Sari, N. P. Y. M. M, I Made Pradana Adiputra, dan Sujana, E. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pmerintah Kabupaten Jembrana). *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2(1).
- Sentosa, K. M. S. 2018. Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Universitas Islam Indonesia.
- Setiaji, W.A. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada RS. PKU Muhammadiyah Surakarta). Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Shannak, R. O. 2015. Government Financial Management Information System: The Case of the Government of Jordan. *Conference Paper April 2015*
- Sitompul, M. dan Lubis, A. A. 2013. Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol 1(1). pp 1-10.
- Suyanto, Taufiq. H, dan Indriati. 2015. Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD Blambangan Banyuwangi. *Jurnal Kedokteran Brawijaya* Vol 28 (2). pp 141-147.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Yin, R. K. 2009. *Case Study Research: Design and Methods*. 4th Edition. California: Sage Publications
- Yin, R. K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press
- Yuliani, S. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*. Vol. 3(2). pp 206-220.